

BAB V

KESIMPULAN

Kesimpulan

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK) PBB yang ada saat ini dibentuk berdasarkan ancaman yang mungkin terjadi pada periode tahun 1945. Namun sejak pembentukannya, iklim politik, ekonomi, teknologi, dan keamanan dunia telah berubah secara signifikan. DK PBB yang ada saat ini harus bisa mengikuti perkembangan tersebut dengan melihat tantangan yang terdapat pada abad 21, bukan kemudian terjebak dalam realitas pasca-Perang Dunia II.

Perubahan terhadap iklim-iklim tersebut juga turut serta membawa ancaman baru yang mungkin memberikan ancaman terhadap keamanan dan perdamaian dunia yang saat ini pun belum sepenuhnya aman dan damai. Sehingga DK PBB perlu melakukan perubahan untuk terus memperbaiki keadaan menjadi semakin baik. Perubahan tersebut juga bertujuan untuk mewujudkan tujuan utama dibentuknya DK PBB yaitu dunia yang aman dan damai sehingga dibutuhkan usaha yang konstan dan konkrit dari seluruh pihak.

Hal itu disebabkan tantangan terhadap keamanan dan perdamaian dunia saat ini semakin kompleks. Peperangan bukan hanya terjadi antar negara saja, melainkan berkembang menjadi antara negara dengan non-negara, contohnya organisasi terorisme. Belum lagi ancaman-ancaman lain yang mengintai seperti perdagangan narkoba yang semakin meluas, pencemaran lingkungan yang semakin parah, perang ekonomi antar negara adidaya, pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan ancaman akan terjadinya Perang Dunia III yang sewaktu-waktu dapat terjadi dikarenakan panasnya hubungan politik antar negara di regional tertentu. Ancaman-ancaman tersebut masih berlangsung dan bukan tidak mungkin akan semakin meluas menjadi ancaman-ancaman baru lainnya.

Sehingga menurut penulis, reformasi terhadap DK PBB saat ini bukan lagi menjadi sebuah pilihan, melainkan sudah menjadi sebuah keharusan untuk dilaksanakan agar dapat selalu bisa menyesuaikan dengan tantangan yang terus

berubah-ubah. Mendasarkan sistem kerja organisasi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terbesar di dunia pada sistem yang diciptakan pada Tahun 1945 dapat memberikan hambatan yang sangat besar bagi jalannya organisasi tersebut, hal itu karena keadaan zaman yang sudah tidak relevan lagi.

PBB dan DK PBB harus mulai menyadari bahwa sistem kerja, kewenangan, tanggung jawab, struktur keanggotaan yang mereka gunakan saat ini sudah tidak dapat mengikuti perkembangan zaman Abad 21. Sehingga PBB dan DK PBB harus mulai melakukan perubahan terhadap hal-hal tersebut untuk tetap dapat memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Anggota tetap DK PBB harus mulai menyadari bahwa kewajiban utama mereka merupakan menjaga keamanan dan perdamaian dunia, ditambah munculnya norma baru berupa "*Responsibility to Protect*" atau R2P mengharuskan mereka menggunakan keistimewaan hak veto yang diberikan dengan hati-hati apabila mereka ingin mempertahankan keistimewaan tersebut. Mereka harus mulai mempertimbangkan bukan hanya kepentingan nasional mereka saja, tetapi juga kepentingan masyarakat internasional yang lebih luas untuk bisa mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat internasional yang rusak sebagai akibat dari peristiwa Perang Dingin.

DK PBB dan PBB harus melakukan upaya yang nyata dan konkrit untuk dapat mengembalikan citra DK PBB yang sudah terluka sebagai akibat dari Perang Dingin menjadi organisasi yang lebih demokratis, akuntabel, dan lebih representatif. Jika tidak, bukanlah hal yang mustahil apa yang terjadi kepada PBB dapat kembali terulang pada PBB.

Menurut penulis, DK PBB dan PBB dapat memulai upaya tersebut dengan mulai menahan diri dengan menggunakan hak veto secara hati-hati dan terbatas pada isu-isu yang tidak menyangkut masalah kemanusiaan dan keamanan dan perdamaian regional. Kemudian mulai mempertimbangkan mengenai perubahan sistem kerja yang ada saat ini untuk ditingkatkan menjadi lebih efisien, demokratis, dan transparan sehingga kepercayaan masyarakat internasional mulai terbentuk. Selain itu DK PBB harus mulai mempertimbangkan perubahan struktur keanggotaan untuk dapat

mengakomodir kebutuhan saat ini dan presentase anggota PBB saat ini yang sudah berubah drastis. Terakhir, yang menurut penulis merupakan salah satu aspek paling penting, DK PBB perlu untuk merubah sistem pengambilan keputusan atas suatu isu menjadi lebih demokratis, transparan, dan adil.

Terakhir penulis berpandangan bahwa proposal-proposal yang sudah ada saat ini masih dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi apabila pihak-pihak yang terlibat mau untuk bekerja sama membahas mengenai reformasi DK PBB ini dengan mengutamakan kepentingan bersama, bukan mengutamakan kepentingan regional atau nasionalnya. Dengan begitu maka bukan hal yang mustahil DK PBB yang baru akan menjadi DK PBB yang memenuhi harapan pendiri PBB sebagai organ yang mewujudkan tujuan dibentuknya PBB.

DAFTAR PUSTAKA

Instrumen Hukum

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 377 Tanggal 3 November 1950

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1991-XVIII Tanggal 17 Desember 1963

Konvensi Wina Tahun 1969

Aturan Prosedur Sementara Dewan Keamanan Nomor S/96/Rev.7 Tahun 1982

Laporan Sekretaris Jenderal atas Panel Tingkat Tinggi tentang Ancaman, Tantangan, dan Perubahan Tahun 2004

Buku

Luard, Evan. 1984. *A History of The United Nations Vol. 1*. London: *The Macmillan Press*

Sunggono, Bambang. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Rajawali Press.

Conforti, Benedetto. 2004. *The Law and Practice of the United Nations 3rd Revised Edition*. Leiden: *Martinus Nijhoff Publishers*.

Bourantonis, Dimitris. 2005. *The History and Politics of UN Security Council Reform 1st edition*. London: Routledge.

Hanhimäki, Jussi M. 2008. *The United Nations: A Very Short Introduction*. New York: *Oxford University Press*

Jurnal

Sellen, Mayor Keith L. 1992. *The United Nations Security Council Veto in the New World Order*. *Military Law Review* Vol. 138.

Goodrich, Leland M. 1947. *From League of Nations to United Nations*. The MIT Press - International Organization, Vol. 1, No. 1.

Fitzgerald, Amber. 2000. *Security Council reform: Creating a more representative body of the entire UN membership*. , *Pace International Law Review* Vol. 12, Issue 2, Art 5.

Weiss, Thomas G. 2003. *The Illusion of UN Security Council Reform*. *The Washington Quarterly*.

- Honghai, Nguyen. 2004. *Reform of the United Nations Security Council: A Requirement of the Times*. Lund University.
- Mikhailitchenko, Maria. 2004. *Reform of the Security Council and its implications for Global Peace and Security*. *Journal of Military and Strategic Studies* Vol. 7.
- Forman, Johanna Mendelson. 2005. *Can Reform Save the United Nations? Opportunities for Creating an Effective Multilateral Body for the Twenty-First Century*, *American Foreign Policy Interests*, Vol 27, No. 5.
- Jan Wouters dan Tom Ruys. 2005. *Security Council Reform: A New Veto for a New Century*. *Institute for International Law Working Paper*.
- Weiss, Thomas G. 2005. *Overcoming the Security Council Reform Impasse: The Implausible versus the Plausible*. Friedrich-Ebert-Stiftung Occasional Papers No. 14.
- Trachsler, Daniel. 2010. *UN Security Council Reform: A Gordian Knot?*. ETH Zurich Centre for Security Studies Vol 72.
- Okhovat, Sahar. 2011. *The United Nations Security Council: Its Veto Power and Its Reform*. *Major Issues and Theology Foundation*.
- Lulseged, Lamrot. 2013. *Vetoing the Veto: Voting Reform and the United Nations Security Council*. Simon Fraser University Library.
- Saliba, Aziz Tuffi. 2013. *Is the Security Council Legibus Solutus? An Analysis of the Legal Restraints of the UNSC*. *Michigan State International Law Review* Vol. 20 Issue 2.
- Vicente, Adérito R. 2013. *United Nations Security Council Reform: The Question of the Veto Power*. *United Nations Institute for Training and Research Multilateral Diplomacy Summer School*.
- Islam, Md. Shariful. 2018. *Security Council of UNO: Evaluation of its Role*. *International Journal of South and South-East Asian Research*, Vol. 1, Issue 1.

Artikel dan Web

United Nations Security Council, Voting System,
<https://www.un.org/securitycouncil/content/voting-system>

UN Security Council Working Method – The Veto, 7 Maret 2020, <https://www.securitycouncilreport.org/un-security-council-working-methods/the-veto.php>

United Nations, Main Organs, <https://www.un.org/en/sections/about-un/main-organs/index.html>

United Nations, Member States, URL: <https://www.un.org/en/member-states/>

United Nations, Security Council Resolutions, <https://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions-0>

Nahory, Céline. *The Hidden Veto*, Global Policy Forum, Mei 2004, <https://www.globalpolicy.org/security-council/42656-the-hidden-veto.html>

Lättilä, Ville. Oxford Research Group, *A New Proposal for UN Security Council Reform*. 28 Mei 2019. <https://www.oxfordresearchgroup.org.uk/blog/a-new-proposal-for-un-security-council-reform>

